

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan harga di Triwulan III Kabupaten Pangandaran mengalami kenaikan pada beberapa komoditas. Komoditas yang mengalami kenaikan diantaranya adalah telur ayam ras yang sempat mengalami penurunan di awal triwulan namun kembali mengalami kenaikan dari Rp. 27.000 menjadi Rp. 30.000. Komoditas lain yang mengalami kenaikan signifikan adalah cabe merah yang pada triwulan sebelumnya Rp. 50.000 naik menjadi Rp. 80.000. Sedangkan, komoditas-komoditas penyumbang inflasi pada triwulan II diantaranya daging ayam ras, cabe rawit justru mengalami penurunan di triwulan III.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Kenaikan harga komoditas-komoditas terjadi di Pangandaran sebagai dampak dari kenaikan bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kenaikan ini berdampak langsung pada masalah distribusi barang sehingga mengakibatkan harga jual meningkat. Khusus pada komoditas telur ayam ras, mengalami kenaikan diakibatkan pada nilai jual dari produsen yang tinggi karena biaya produksi diantaranya adalah masalah pakan. Selain dari produsen yang tinggi, kenaikan juga dipicu oleh bantuan sosial komoditas telur dimana banyak pemasok yang menjual telur untuk kebutuhan program pemerintah dengan harga yang naik sehingga berdampak pada harga jual di pasar. Kenaikan harga juga disebabkan oleh kurangnya pasokan dari distributor terutama pada komoditas telur.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dengan semakin meningkatnya harga bahan pokok dan penting di Kabupaten Pangandaran, pemerintah melalui Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan dengan mengadakan Operasi Pasar Murah yang bertujuan untuk memitigasi atau mengatasi dampak kenaikan harga beberapa kebutuhan pokok. Dalam hal ketersediaan pangan, Pangandaran bersinergi dengan program pusat yaitu membentuk Tim Satuan Tugas Ketahanan Pangan (Satgas Pangan) yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemantauan atas ketersediaan stabilitas harga, serta kelancaran distribusi pangan dan mengantisipasi gejolak harga

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kegiatan Operasi Pasar murah belum dapat menjangkau masyarakat di daerah jika melihat wilayah Kabupaten Pangandaran yang luas. Dalam pelaksanaannya, kegiatannya OPS hanya bertempat di pusat kegiatan masyarakat saja dan dalam waktu yang terbatas sehingga belum optimal namun dapat membantu masyarakat terutama dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar. Pada periode ini, tim satgas pangan baru terbentuk dan belum melaksanakan fungsinya secara optimal.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa kebijakan yang telah dilaksanakan pada triwulan III harus bersifat berkelanjutan sehingga akan berdampak pada pengendalian inflasi di Kabupaten Pangandaran.